Makalah Filsafat Moral

Politik Memanas : Habis “Sontoloyo” terbitlah “Genderuwo”

Disusun oleh :

Nanda Putri Briliyanti

(51416046)

Manajemen

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN

2018

Politik Memanas : Habis “Sontoloyo” terbitlah “Genderuwo”

Abstrak

Politik merupakan hubungan interaksi antar pemerintah dengan masyarakat dalam mengambil keputusan yang mempunyai sifat mengikat. Sedang etika merupakan karakter baik maupun buruk yang melekat dalam diri manusia. Politik dan etika mempunyai hubungan kuat. Dalam realitanya hubungan keduanya terdapat penyimpangan. Seperti pada kasus politik genderuwo dan politik sontoloyo tidak menggambarkan adanya hubungan yang erat antara politik dan etika. Politik sontoloyo dan politik genderuwo merupakan kegiatan politik yang menggunakan cara tidak baik untuk kepentingan sendiri. Cara yang digunakan kaum politik elit sekarang adalah dengan menyebarkan propaganda yang bertujuan memecah belah bangsa.

Kata kunci : Etika, Politik

A. Latar Belakang

Etika merupakan karakter yang melekat dalam setiap individu. Etika sendiri merupakan suatu asas-asas mengenai akhlak manusia yang dijelaskan pada kamus besar bahasa Indonesia. Etika merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dalam hidup bermasyarakat. Tidak hanya dalam hal bermasyarakat tetapi etika sendiri juga diperlukan dalam berpolitik.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, di Indonesia banyak individu yang tidak memiliki etika baik. Bahkan pada kalangan politikus di Indonesia, padahal dalam berpolitik diperlukan adanya etika supaya tidak menjadi politik brutal dan kotor. Politik kotor sendiri merupakan suatu hal yang dianggap negatif oleh masyarakat. Politik kotor mempunyai realitas yang keras dimana dalam lapangan kehidupan konkret kegiatan politik itu sendiri dirasa tidak sehat.

Etika dan politik mempunyai hubungan yang sangat kuat. Menurut Aristoteles hubungan keduanya yakni politik mengandaikan etika atau etika menjadi dasar dalam kegiatan politik. Politik hanya akan ada karena etika yang baik, manusia yang tindakannya menuju kebaikan akan menciptakan suasana politik yang baik pula.

Suasana politik di Indonesia saat ini semakin memanas. Dimana kaum elit politik sekarang saling menyerang satu sama lain dengan mempropaganda masyarakat. Banyak politikus yang tidak menerapkan hubungan antara etika dengan politik serta tidak mempunyai sopan santun politik yang baik. Dampak dari propaganda tersebut tidak hanya dirasa oleh kalangan politisi namun juga berdampak pada masyarakat luas. Sebagian masyarakat menjadi resah, takut dan terpengaruh dengan adanya isu-isu yang dibuat oleh kaum elit politik.

Berpolitik dengan cara seperti ini merupakan cara berpolitik yang tidak baik. Dapat disebut politik yang tidak baik karena dengan membuat masyarakat takut dengan adanya isu-isu yang tidak benar untuk kepentingan sendiri. Dengan adanya politik yang tidak beretika ini mendapat julukan politik genderuwo yang di lontarkan oleh kepala negara kita. Sebelum itu presiden Jokowi juga melontarkan kata politik sontoloyo karena jengkel dengan adanya politikus yang mempunyai niat untuk memecah belah bangsa dengan adanya isu yang mengakibatkan keresahan masyarakat.

B. Landasan Teori

1. Etika

Etika merupakan filsafah tentang tindakan manusia sebagaimana manusia, hal tersebut berhubungan langsung dengan tindakan atau tingkah laku manusia yang memiliki nilai-nilai kebaikan (Dewantara 2017). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa etika adalah ilmu mengenai apa yang baik dan burr dan tentang hak serta kewajiban moral. Selain itu, etika juga menilai tentang benar ataupun salah yang dianut sebuah golongan ataupun masyarakat.

Etika memiliki tujuan mengantarkan masyarakat melakukan hal yang baik dan menjadi masyarakat yang baik. Etika mempunyai hubungan dengan beberapa hal. Yang pertama etika berhubungan dengan logika dan estetika, dimana logika merupakan norm yang jelas pasti dan tidak mungkin di langgar oleh masyarakat normal. Sedangkan estetika memiliki prinsip kecantikan, pesona dan lain sebagainya. Yang kedua yakni hubungan etika dengan ilmu filsafah lain yang mempunyai karakteristik praktis seperti halnya hukum dengan politik.

Selain itu, Aristoteles menyatakan bahwa etika dan politik mempunyai hubungan yang kuat antara satu dengan yang lain. Menurut Aristoteles pengertian etika sendiri merupakan kebaikan yang menggambarkan setiap aktivitas manusia mempunyai tujuan kebaikan.

2. Politik

Menurut Cholisin (2003;2) secara etimologis, dalam bahasa Yunani politik berasal dari kata *polis* yang berarti negara kota, kemudian berkembang menjadi *polities* yang berarti warga negara, *politikos* yang berarti kewarganegaraan serta *politike tehne* yang berarti kemahiran politik. Politik merupakan hubungan interaksi pemerintah dengan masyarakat dalam hal proses pembuatan serta pelaksanaan dari keputusan yang bersifat mengikat mengenai kebaikan seluruh masyarakat dalam suatu wilayah tertentu (Ramlan 1992;11). Jadi, politik merupakan sebuah proses pencapaian dan pelaksanaan tujuan dari politik tersebut.

Politik merupakan suatu usaha pemikiran dalam hal kepengurusan pemerintah, menjalankan sebagaimana fungsinya, merinci kewajiban serta hak, melakukan adanya pengawasan terhadap penguasa untuk dipatuhi ketika ia melakukan hal yang baik serta dikritik pada saat mereka melakukan hal yang tidak baik. Tidak hanya internal tetapi juga masalah eksternal rakyat, seperti halnya memelihara kemerdekaan serta kebebasan bangsa, berupaya mencapai tujuan agar berada pada kedudukan tengah-tengah bangsa lain,

Politik disebut juga dengan seni sebab banyak dijumpainya politisi yang tidak mempunyai pendidikan politik tetapi dapat menjalankan roda politik yang praktis. Menurut Dewantara (2017) Politik kotor merupakan paham yang memisahkan antara moral dengan politik. Dimana moral adalah lapangan pertimbangan seseorang antara dosa dan tidak dosa. Sedangkan, politik merupakan lapangan kekuasaan melulu.

Menurut Machiavelli dalam Dewantara (2017) menyatakan bahwa politik bukanlah semata-mata berhubungan dengan kekuasaan ataupun ekonomi. Tetapi lapangan kehidupan yang berkaitan dengan seluruh hubungan antar manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan, negara dan

segala proses yang ada tidak terlepas dari politik. Sehingga politik itu sendiri memiliki arti yang sangat luas.

3. Politik dan Etika

Politik dan etika mempunyai inti *parenial* (abadi) dimana hal tersebut sangat penting karena secara langsung berhubungan dengan kodrat hidup bersama umat manusia (Dewantara 2017). Hubungan antara politik dan etika adalah inti yang sekilas jelas tetapi akan menjadi kompleks jika dilihat dari sudut pandang realitas kehidupan manusia sekarang.

Etika mempunyai tujuan yang berkait dengan kehidupan manusia sedangkan ilmu spekulatif yang lain berkaitan dengan aktivitas tertentu dari manusia. Seperti hal logika secara jelas berkaitan dengan aktivitas budi manusia (Dewantara 2017).

Dalam Dewantara (2017) menurut Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan beberapa pengertian politik menjadi tiga hal yang dapat ditarik kesimpulannya yakni, yang pertama politik itu menyangkut dari tata hidup bersama mengenai sistem dasar dari pemerintahan, kebijakan serta tindakan bersama. Yang kedua politik itu berkenaan dengan bidang intelektual atau pengetahuan serta tindakan seseorang dalam menghadapi suatu hal atau disebut dengan praksis.

4. Hubungan Etika-Politik Menurut Aristoteles

Hubungan etika dengan politik menurut Aristoteles mempunyai hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya, dimana hubungan tersebut dapat dilihat melalui cara pandang Aristoteles mengembangkan teori politiknya yang dimulai melalui prinsip etika (Dewantara 2017). Jadi, hubungan antara politik dan etika tidak hanya menjelaskan hubungan satu dengan yang lainnya tetapi politik itu sendiri mengumpamakan etika dan menjadi sempurna dalam politik.

Etika merupakan suatu yang berkaitan dengan segala aktivitas atau kegiatan manusia yang menuju pada kebaikan. Jadi, politik merupakan sistem tatanan hidup

bersama yang mengasumsikan etika kebaikan dan juga sebagai puncak dari kesempurnaan dari etika.

Dengan demikian hubungan dari politik dan etika menurut Aristoteles mempunyai hubungan yang kuat. Dimana pada kenyataannya etika merupakan dasar utama dari politik. Dengan kata lain sebagai jembatan yang menghubungkan politik dengan etika.

5. Hubungan Etika-Politik Menurut Machiavelli

Machiavelli merupakan pendiri dari filsafah politik modern karena ia tidak sependapat dengan kenyataan yang terjadi atau realisme (Dewantara 2017). Machiavellian adalah tolak ukur yang jelas untuk revolusi etika politik bahwa politik dan etika itu terjadi pada realitas atau dunia nyata bukan dalam kehidupan pangeran.

Pendapat dari Machiavelli bertolak belakang dengan para filosofi klasik misalnya Aristoteles , menurut Machiavelli politik tidak termasuk dalam ruang lingkup etika yang menjadi keutamaan manusia. Politik tersebut memiliki lintas keutamaannya sendiri mengenai keutamaan negara, serta bertujuan untuk menjaga kestabilan kedudukan dan keutuhan bangsa dari berbagai ancaman yang bisa saja terjadi (Dewantara 2017).

Bagi Machiavelli politik merupakan urusan bagaimana seorang pemimpin mengatur bagaimana dia mengatur perilakunya terhadap masyarakat , rekan dan lingkungannya. Machiavelli menegaskan pendapatnya bahwa terdapat jurang antara etika dengan politik. Machiavelli meyakini bahwa sulit bagi seorang pemimpin untuk mempunyai perilaku atau tingkah laku baik seperti raja, kesulitan tersebut dijadikan tolak ukur guna pengagasan kebijakan atau peraturan.

6. Hubungan Etika-Politik Menurut Hobbes

Menurut Hobbes hubungan etika dengan politik adalah dimana etika tersebut mengasumsikan politik. Hal tersebut berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Aristoteles dimana Aristoteles berpendapat bahwa politik mengasumsikan

etika. Konsep hubungan etika dengan politik mengasumsikan bahwa hukum berada dalam ruang lingkup masyarakat politik (Dewantara 2017).

C. Study Kasus

Politik Sontoloyo dan Politik Genderuwo

Jumat, (9/11/2018) Presiden Jokowi melontarkan pernyataan mengenai “Partai Genderuwo”, pernyataan tersebut dilontarkan oleh presiden ketika beliau pidato diacara pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Alasan beliau menyebut politik genderuwo karena sekarang banyak politikus yang pandai mempengaruhi masyarakat. Menurut presiden Jokowi politik dengan propaganda berdampak buruk bagi masyarakat, yakni membuat masyarakat menjadi takut dan kekhawatiran. Setelah propaganda itu membuat takut masyarakat yang selanjutnya adalah munculnya ketidakpastian atau kabar yang diterima masyarakat masih simpang siur. Politikus yang menakut-nakuti dengan propaganda yang tidak jelas inilah yang dimaksud politik genderuwo. Berpolitik dengan cara seperti ini menurut beliau merupakan politik tidak beretika karena menakut-nakuti masyarakat. entah siapa yang dituju oleh bapak presiden mengenai sebutannya politik genderuwo, yang jelas kepala negara indonesia ini melontarkan kata “genderuwo” yang membuat dunia politik menjadi ramai.

Sebelumnya presiden Jokowi juga sempat melontarkan kata “Politik Sontoloyo” ketika beliau berorasi diacara pembagian 5000 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/10). Beliau melontarkan kata sontoloyo karena merasa kesal dan jengkel kepada para politikus yang menggunakan cara yang kotor atau politik kotor. Beliau berkata sebelumnya beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Presiden Jokowi juga menghimbau kepada masyarakat supaya tidak mudah terpengaruh oleh kaum elit politik yang mempunyai niat untuk memecah belah bangsa. “hati-hati banyak politik yang baik-baik, tetapi juga banyak politik yang sontoloyo, ini saya ngomong apa adanya saja sehingga marik kita saring , kita filter, mana yang betul dan mana yang tidak betul. Karena masyarakat sekarang

semakin matang dalam berpolitik” ujar Jokowi. Kata “Sontoloyo” dan “Genderuwo” disini membuat dunia politik indonesia semakin ramai dan semakin memanas.

D. Pembahasan

Dari study kasus diatas jika ditinjau dari teori yang telah dijelaskan maka jagat politik di indonesia memang tergolong dalam politik yang kotor. Bahkan dengan adanya julukan yang dilontarkan kepala presiden tersebut memberikan arti bahwa ranah politik di indonesia tidak sehat. Yang pertama jika dikaitkan dengan teori etika, kaum politik elit di indonesia tidak memiliki etika yang baik, padahal didalam landasan teori dijelaskan bahwa etika merupakan tindakan manusia sebagaimana manusia. Etika sendiri berkaitan dengan moral seseorang serta berhubungan dengan sopan santun. Jadi, jika kaum elit politik membuat propaganda yang tidak benar untuk membuat ketidakpastian dan memunculkan rasa ragu-ragu dalam masyarakat, bahkan membuat masyarakat resah dan khawatir merupakan politik dengan cara yang tidak baik. Membuat isu yang belum ada kebenarannya hanya untuk kepentingan sendiri. Jadi disini kaum elit politik indonesia dapat dikatakan tidak mempunyai etika yang baik sebagaimana yang tergambar dalam kasus politik sontoloyo dan politik genderuwo tersebut. Dapat dikatakan kaum elit politik tidak beretika karena bertolak belakang dengan tujuan dari etika. Dimana etika bertujuan untuk mengantar seseorang untuk berperilaku baik mempunyai karakter yang baik guna menjadi manusia yang baik.

Jika ditinjau dari landasan teori politik, kasus tersebut merupakan politik yang kotor dan tidak beretika. Karena politik dan etika itu sendiri mempunyai hubungan keterikatan yang kuat seperti apa yang dijelaskan oleh Aristoteles. Tetapi realitasnya pada kasus politik sontoloyo dan politik genderuwo ini tidak ada dikaitkan sama sekali antara etika dengan politik. Jika dilihat dari penjelasan Aristoteles mengenai hubungan etika dan politik seharusnya aktivitas politik ini akan berdampak baik bagi semua kalangan, karena menurutnya aktivitas apapun pasti menuju kebaikan. Tetapi pada kasus ini aktivitas politik yang membuat

propaganda untuk membuat masyarakat resah tidak menimbulkan adanya dampak kebaikan bagi masyarakat dan semuanya, yang ada malah memecah belah bangsa.

Kemudian jika ditinjau dari hubungan etika dan politik menurut Machiavelli mungkin kasus aktivitas politik yang dianggap dengan cara tidak baik ini biasa saja. Karena menurut Machiavelli politik tidak masuk dalam ruang lingkup etika dan politik memiliki lintas tersendiri dan tidak berkaitan dengan etika. Tetapi menurutnya jika seorang politikus mengaitkan antara politik dengan etika maka hal tersebut dapat menjadi jurang dan ia akan jatuh pada kehancuran dirinya sendiri. Tetapi jika dihubungkan dengan teori milik hobbes yang menyatakan bahwa etika mengandaikan politik. Kasus ini tidak menerapkan bahwa dalam masyarakat itu sudah ada yang namanya hukum dan didalam hukum tersebut etika ada. Jadi, sekali lagi dapat dikatakan kasus mengenai politik sontoloyo dan politik genderuwo ini merupakan politik kotor dan tidak sehat.

E. Kesimpulan

Sehubungan dengan penjelasan diatas kasus politik sontoloyo dan politik genderuwo dapat dikatakan bahwa kaum elit politik menggunakan cara yang tidak baik dan dapat dikatakan bahwa pada era ini politik di indonesia merupakan politik kotor. Dimana kaum politik elit dalam menjalankan kegiatan politik tidak memperhatikan hubungan antara politik dan etika maupun etika dan politik. Sehingga politik menggunakan cara menyebarkan propaganda yang belum tentu kebenarannya dan berdampak buruk bagi masyarakat. Masyarakat menjadi resah, takut dan bingung dengan adanya ketidakpastian yang dapat memecah belah bangsa indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, A. (2017). *Filsafat Moral (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia)*. Daerah Istimewa Yogyakarta. Kanisius
- Dewantara A.W. (2017). *Kerasulan Awam Di Bidang Politik (Sosial-Kemasyarakatan), Dan Relevansinya Bagi Multikulturalisme Indonesia*. STKIP Widya Yuwana Madiun
- Dewantara, A. (2017). *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. Daerah Istimewa Yogyakarta. Kanisius.
- Dewantara, A. W. (2013). Merefleksikan Hubungan antara Etika Aristotelian dan Bisnis dengan Studi Kasus Lumpur Lapindo. *Arete*, 2(1), 23-40.
- Thompson Dennis. 1999. *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta. Katalog Dalam Terbitan
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/15/16385101/kode-dari-jokowi-di-balik-istilah-sontoloyo-dan-genderuwo>